

JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS

Vol. 3 No. 2 April 2013

- Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro terhadap *Return* Saham Syariah yang Listing di Jakarta Islamic Index
A. Ifayani Haanurat
- Daya Saing dan Kebijakan Ekonomi Internasional Kayu Lapis Indonesia
M. Yusuf S. Barusman
- Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung Timur
Febrianto
- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Dampaknya terhadap Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung
H.M. Achmad Subing
- Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM – MPd) Melalui Proses Pengembangan Kapasitas (Studi di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)
Tukasno
- Analisis Rasio Keuangan untuk Mengevaluasi Tingkat Kesehatan dan Perkembangan Usaha PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kedaton di Bandar Lampung
T o t o n

JURMABIS	Vol. 3	No. 2	Hlm. 115-210	Bandar Lampung April 2013	ISSN 2087-0701
----------	--------	-------	--------------	------------------------------	-------------------



PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG (UBL)

JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS

Vol. 3 No. 2 April 2013

Pembina

Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A.
Andala Rama Putra Barusman, S.E., M.A.Ec.

Penanggung Jawab

Dr. Alex Tribuana Sutanto, S.T., M.M.

Ketua Penyunting

Sapmaya Wulan, S.E., M.S.

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.S. (Fakultas Ekonomi UNILA)
Dr. Herry Harjanto Hadi, S.E., M.Si. (Fakultas Ekonomi UBL)
Dr. Anna Wulandari, S.E., M.M. (STIE IPWIJA)
Dr. Hanes Riady, M.M., M.B.A. (IBII Jakarta)
Dr. Nur'aeni, M.M. (Fakultas Ekonomi USBRJ)

Penyunting Pelaksana

Ardansyah, S.E., M.M.

Tata Usaha

Olivia Tjioener, S.E., M.M

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen

Jurnal Manajemen dan Bisnis terbit 2 kali setahun pada bulan Oktober dan April
Artikel jurnal merupakan artikel hasil penelitian (empiris) dan artikel konseptual yang mencakup kajian bidang Manajemen dan Bisnis.

Alamat Redaksi

Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung
Kampus A Jln. Z. A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979 Fax: 0721-701467 Hp: 0811798834 Email: sapmaya.wulan@ubl.ac.id

JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS

Vol. 3 No. 2 April 2013

DAFTAR ISI

Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro terhadap <i>Return</i> Saham Syariah yang Listing di Jakarta Islamic Index	115-134
A. Ifayani Haanurat	
Daya Saing dan Kebijakan Ekonomi Internasional Kayu Lapis Indonesia	135-149
M. Yusuf S. Barusman	
Analisis Minat Berwirausaha Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung Timur	150-159
Febrianto	
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Dampaknya terhadap Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung	160-177
H. M. Achmad Subing	
Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pedesaan (PNPM-MPd) Melalui Proses Pengembangan Kapasitas (Studi di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)	178-197
T u k a s n o	
Analisis Rasio Keuangan untuk Mengevaluasi Tingkat Kesehatan dan Perkembangan Usaha PT. Pegadaian (Peresero) Cabang Kedaton di Bandar Lampung	198-210
T o t o n	

**DAYA SAING DAN KEBIJAKAN EKONOMI INTERNASIONAL
KAYU LAPIS INDONESIA**

***THE COMPETITIVENESS AND INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY
PLYWOOD INDONESIA***

M. Yusuf S. Barusman

**Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
Jln. Z. A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142.
Tel. 0721-701979, Fax. 0721-701463, Hp.08127203918 email: yusuf.barusman@ubl.ac.id**

ABSTRAK

Ekspor kayu lapis Indonesia dominan selama periode 1988 hingga 2003, volume ekspor kayu lapis selalu lebih besar dari Malaysia sehingga Indonesia dianggap sebagai pemimpin pasar (*market leader*) khususnya untuk kayu lapis tropic (*tropical hardwood*) sedangkan Malaysia sebagai pengikut pasar (*market follower*). Sejak Tahun 2004, Malaysia menggantikan posisi Indonesia sebagai pengekspor kayu lapis yang dominan. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis daya saing internasional industri kayu lapis Indonesia ditinjau dari model *Heckscher-Ohlin factor endowment* (H-O), 2) Menganalisis kebijakan ekonomi internasional dalam pengembangan industri kayu lapis Indonesia, dan 3) Menganalisis strategi kebijakan ekonomi internasional produk kayu lapis Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Dari analisis dengan model *Heckscher-Ohlin factor endowment* (H-O) diperoleh hasil bahwa secara teori ketersediaan *factor endowment* merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya daya saing internasional, namun secara empirik ketersediaan *factor endowment* tersebut bukan satu-satunya faktor penyebab terciptanya daya saing internasional. 2) Dari analisis kebijakan ekonomi internasional pengembangan industri kayu lapis Indonesia diperoleh hasil: a) Kebijakan larangan ekspor kayu bulat Indonesia memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap daya saing internasional, menjadikan industri kayu lapis sebagai industri yang tidak efisien dan tidak memiliki daya saing internasional (kelangsungan hidupnya tergantung pada kebijakan pemerintah), serta menyebabkan sumber daya hutan alam menjadi rusak sehingga ketersediaan *factor endowment* (kayu bulat) menjadi langka dan mahal dan pada akhirnya kayu bulat bukan lagi sebagai *factor endowment*. 3) Kebijakan ekonomi internasional produk kayu lapis dalam menghadapi era globalisasi dapat ditempuh melalui berbagai strategi dengan menggunakan konsep *marketing re-positioning* (MRP), diantaranya adalah: a) Menghentikan kebijakan ekspor berbasis komoditas dan menggantikan dengan ekspor berbasis produk berdasarkan konsep bauran pemasaran, b) Menghentikan kebijakan ekonomi internasional yang cenderung mengatur dan memanjakan industri kehutanan (kayu lapis), c) Mendorong industri kayu lapis lebih kreatif sehingga mampu menciptakan produk turunan berdasarkan konsep bauran pemasaran.

Kata Kunci: Daya Saing, Kebijakan Ekonomi Internasional, Strategi Marketing

ABSTRACT

The dominance of Indonesia's plywood exports during the period 1988 to 2003, the export volume of Indonesia's plywood is always greater than in Malaysia so that Indonesia can be considered as the market leader (market leader), especially for the tropic plywood (tropical hardwood), while Malaysia is a follower of the market (market follower). Since 2004 Malaysia replaces Indonesia's position as the dominant exporter of plywood. The purpose of this study was to: 1) analyze the international competitiveness of Indonesian plywood industries in terms of the model of Heckscher-Ohlin factor endowment (HO), 2) analyze the international economic policy towards the development of Indonesian plywood industries, and 3) to analyze international strategic of economic product policy of Indonesian plywood in the era of globalization. Based on the analysis we can conclude the following: 1) From the analysis of the model of Heckscher-Ohlin factor endowment (HO) showed that theoretically availability factor endowment is a factor that could encourage the creation of international competitiveness, but factor endowment's availability in empirically is not the only factor which caused the creation of international competitiveness. 2) From the analysis of international economic policy development of Indonesian plywood industries results obtained were as follows : a) Indonesia's banned log export policy provides positive and negative influences on international competitiveness, making plywood industry inefficient and lacks international competitiveness(which existences depends on government policy), as well as the causes of natural forest resources become damaged so that the availability of factor endowment (logs) become scarce and expensive and ultimately logs no longer a factor endowment. 3) The policy of international economic plywood products in the era of globalization can be reached through a variety of strategies using the concept of marketing re-positioning (MRP), which are: a) Stop the export policy of commodity-based and replaces the export policy based products based on the concept of the marketing mix, b) Stop the international economic policies which tend to set up and spoil the forestry industry (plywood) in the country, c) Encouraging the plywood industry more creatively so as to create derivative works based on the concept of the product in the marketing mix.

Keywords: Competitiveness, International Economic Policy, Strategic Marketing

PENDAHULUAN

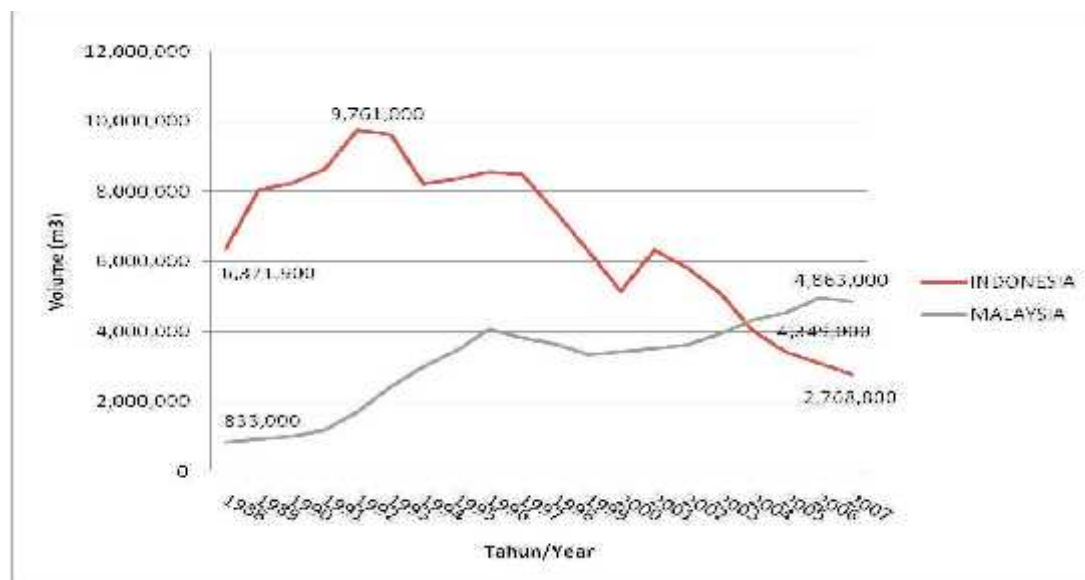
Kayu lapis telah menjadi primadona produk industri kayu olahan Indonesia selama beberapa tahun. Angka ekspor tertinggi yang pernah dicapai adalah pada Tahun 1992 sebesar 9,7 juta m³ (FAO2009). Dengan tingkat volume ekspor tersebut Indonesia dapat digolongkan memiliki peranan dominan dalam pasar kayu lapis tropis dunia. Kurang lebih 80 persen produksi

kayu lapis Indonesia selama ini dijual untuk tujuan ekspor. Peningkatan kapasitas produksi kayu lapis Indonesia besar-besaran yang terjadi sejak tahun 1980an adalah sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan pada industri perindustri kehutanan. Pertama, larangan ekspor kayu bulat pada periode 1985 sampai 1997 yang disusul oleh kebijakan larangan kembali melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhut No.1132/Kpts-II/2001 dan Menperindag No. 292/MPP/Kep/10/2001, sedangkan ekspor

kayu gergajian mengalami berbagai perubahan kebijakan yang pada umumnya bersifat membatasi. Selanjutnya, untuk mengamankan ketersediaan bahan baku kayu bagi industri maka dikeluarkan kebijakan yang mengaitkan sumber kayu bulat dengan industri. Dengan dukungan kebijakan-kebijakan tersebut industri kayu lapis berkembang dengan pesat (*policy-driven*). Perkembangan tersebut juga didukung oleh institusi perbankan yang mudah memberikan kredit investasi (Dwiprabowo, 2009).

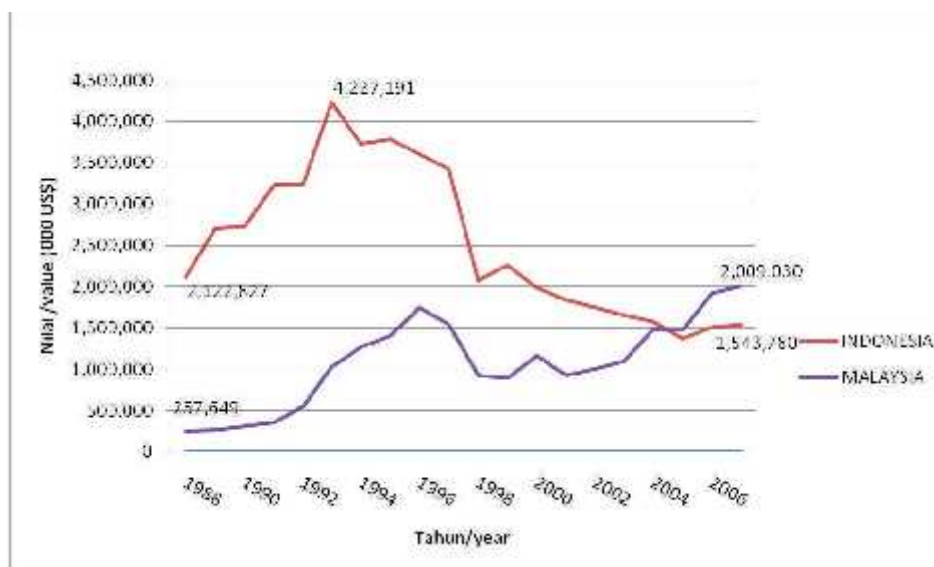
Industri kayu lapis diketahui sebagai industri yang menyerap banyak tenaga kerja dan memanfaatkan sumber daya alam (kayu bulat) dalam proses produksinya. Dengan kondisi ini dapat dikatakan bahwa industri kayu lapis secara umum memanfaatkan *factor endowment* dalam proses produk-

sinya. Mengingat sumber alam (kayu bulat) digunakan sebagai bahan baku utama (kayu bulat), maka sangat banyak sekali kebijakan lingkungan yang harus diterima oleh industri kayu bulat di Indonesia. Dwiprabowo (2009) mengatakan bahwa sejak tahun 1988 hingga tahun 2005 Indonesia dan Malaysia menikmati perkembangan ekspor kayu lapis yang selalu meningkat. Selama masa tersebut volume ekspor kayu lapis Indonesia senantiasa lebih besar dari pada Malaysia sehingga Indonesia dapat dianggap sebagai pemimpin pasar (*market leader*) khususnya untuk kayu lapis tropic (*tropical hardwood*) sedangkan Malaysia merupakan pengikut pasar (*market follower*). Volume ekspor kedua negara jika digabung memiliki pangsa pasar terbesar (*dominan*) dunia untuk jenis kayu lapis kayu keras (*hardwood*). Perkembangan tersebut dapat diikuti pada Gambar 1 dan 2.



Sumber: FAO 2009 (Data diolah) dalam Dwiprabowo(2009)

Gambar 1. Perkembangan Volume Ekspor Kayu Lapis Indonesia dan Malaysia Tahun 1988-2007



Sumber: FAO 2009 (Data diolah) dalam Dwiprabowo(2009)

Gambar 2 . Perkembangan Nilai Ekspor Kayu Lapis Indonesia dan Malaysia (1988 -2007)

Ekspor kayu lapis Indonesia dominan selama periode 1988 hingga 2003 dengan, puncaknya Tahun 1992 dengan volume ekspor 9,7 jutam³. Namun sejak 1992 perkembangan ekspor cenderung menurun meskipun masih dominan hingga tahun 2004. Sedangkan, volume ekspor kayulapis Malaysia pada periode tersebut jauh berada di bawah Indonesia namun cenderung meningkat secara konsisten dan pada tahun 2004 volume ekspor Malaysia melampaui Indonesia. Sejak Tahun 2004 Malaysia menggantikan posisi Indonesia sebagai pengekspor kayu lapis yang dominan. Fakta menurunnya daya saing ekspor kayu lapis Indonesia dan naiknya daya saing ekspor kayu lapis Malaysia seperti tersaji pada Gambar 1 dan 2 merupakan suatu fenomena yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai pengaruh kebijakan lingkungan (khususnya kebijakan ekonomi internasional) terhadap daya saing internasional khususnya dengan pendekatan model H-O yang dikembangkan

oleh Md.Ashfaqul I. Babool dan Michael R.Reed Tahun 2005. Hal ini dapat dikatakan mengingat secara riil ketersediaan *factor endowment* khususnya bahan baku industry kayu lapis (kayu bulat) di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan Malaysia.

Globalisasi ekonomi secara nyata telah membawa negara-negara di dunia dalam posisi saling ketergantungan satu sama lainnya khususnya dalam bidang ekonomi (*economic interdependence*). Berkaitan dengan hal ini, maka menurunnya daya saing internasional kayu lapis Indonesia dalam globalisasi tentu membawa konsekuensi terhadap berbagai hal terkait dengan pengembangan industri kayu lapis Indonesia di masa depan. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam hal ini secara umum harus menentukan strategi kebijakan apa yang tepat guna mengatasi semakin menurunnya daya saing kayu lapis Indonesia dalam era globalisasi tersebut.

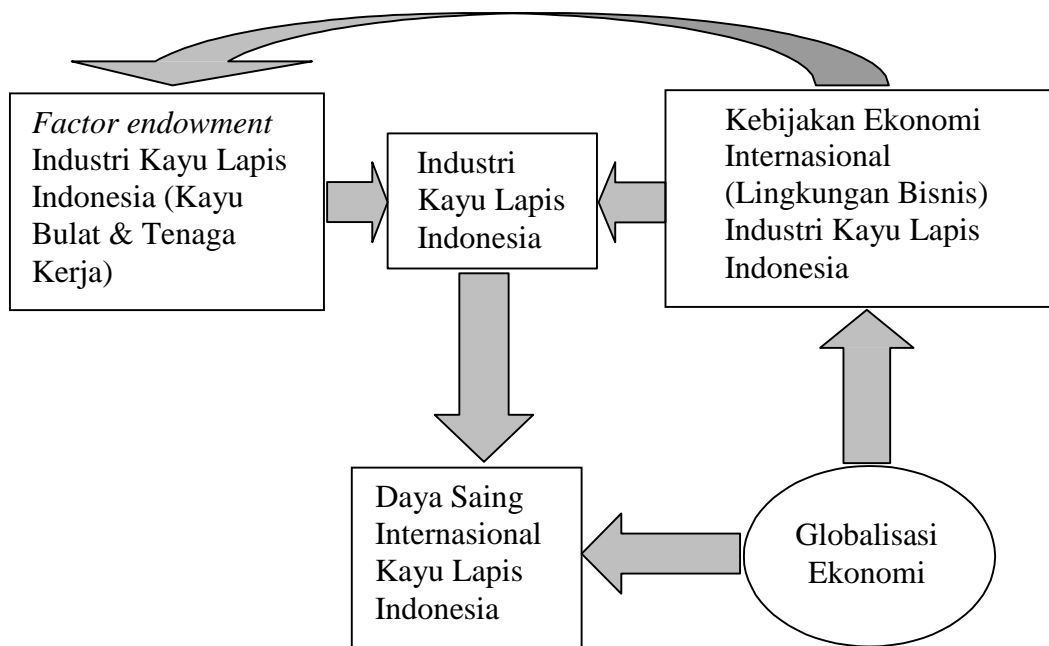
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah daya saing internasional industri kayu lapis Indonesia ditinjau dari model *Heckscher-Ohlin factor endowment* (H-O)? 2) Bagaimanakah kebijakan ekonomi internasional Indonesia dalam mendukung pengembangan industri kayu lapis Indonesia? 3) Bagaimanakah strategi kebijakan ekonomi internasional produk kayu lapis Indonesia dalam menghadapi eraglobalisasi? Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis daya saing internasional industri kayu lapis Indonesia ditinjau dari model *Heckscher-Ohlin factor endowment* (H-O), 2) Menganalisis kebijakan ekonomi internasional dalam pengembangan industri kayu lapis Indonesia, 3) Menganalisis strategi kebijakan ekonomi internasional produk kayu lapis Indonesia dalam menghadapi era globalisasi.

Kerangka Pemikiran. Hasil studi Babool dan Reed (2005) salah satunya mengungkapkan bahwa generalisasi model H-O tidak dapat diterapkan untuk semua industri guna menguji pengaruh kebijakan lingkungan terhadap daya saing internasional mengingat secara empirik hasilnya tidak sama untuk semua industri dengan berbagai produk (hasil empirik tidak selalu sejalan dengan teori). Industri kayu lapis sebagai salah satu Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara di dunia mengingat setiap negara tidak dapat hidup secara mandiri tanpa menjalin hubungan dengan negara lain. Faktor ekonomi sebagai salah satu pendorong terjadinya globalisasi secara nyata telah menyatukan negara di dunia dan menyebabkan terjadinya hubungan saling ketergantungan ekonomi (*economic interdependence*). Indikasi terjadinya hubungan saling ketergantungan ini adalah terjadinya perdagangan internasional antar negara didunia.

industri pengolahan kayu pernah menjadi primadona industri kayu di Indonesia mengingat industri kayu lapis berhasil menyumbangkan devisa sangat besar bagi negara sebagai akibat dari perdagangan internasional khususnya ekspor. Selain itu, industri kayu lapis Indonesia pernah memiliki daya saing internasional paling tinggi di dunia. Namun demikian, seiring dengan perjalanan waktu maka daya saing internasional industri kayu lapis Indonesia cenderung menurun bahkan hingga bergeser tingkat daya saing internasionalnya ke urutan ke dua di dunia setelah Malaysia.

Merujuk studi yang dilakukan Babool dan Reed (2005), perubahan daya saing internasional industri kayu lapis Indonesia terjadi karena dua faktor yaitu perubahan kondisi *factor endowment* seperti dalam model H-O atau perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan ekonomi internasional maupun kebijakan ekonomi terkait dengan *factor endowment*. Kedua faktor tersebut merupakan dua faktor utama sebagai penentu daya saing internasional industri kayu lapis khususnya Indonesia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara konsep daya saing internasional industri kayu lapis Indonesia akan berubah apabila kondisi *factor endowment* atau kebijakan ekonomi internasional (lingkungan bisnis) industri juga mengalami perubahan (Gambar3).

Dampak globalisasi ekonomi termasuk juga perdagangan internasional kayu lapis Indonesia ini, dipastikan akan mempengaruhi penurunan daya saing internasional kayu lapis. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan ekonomi internasional dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi ini. Dengan demikian, pemerintah harus menentukan strategi kebijakan ekonomi internasional yang tepat bagi produk kayu lapis yang telah dikembangkan sebagai sumber devisa negara (Gambar 3). Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan bagan paradigma kerangka pemikiran pada Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan dan mengkaji tentang suatu fenomena, masalah yang muncul serta proses pemecahan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat. Dalam penelitian ini fenomena yang diangkat adalah tentang daya saing internasional dan kebijakan ekonomi internasional industri kayu lapis Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan kajian secara teoritis tentang perkembangan daya saing internasional industri kayu lapis Indonesia berdasarkan model *Heckscher-Ohlin Factor Endowment (H-O)*, serta kajian teoritis terhadap kebijakan ekonomi internasional industri kayu lapis Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan informasi-informasi

yang bersumber dari data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang mengkaji kondisi fakta dan fenomena yang ada dengan batasan-batasan teoritis.

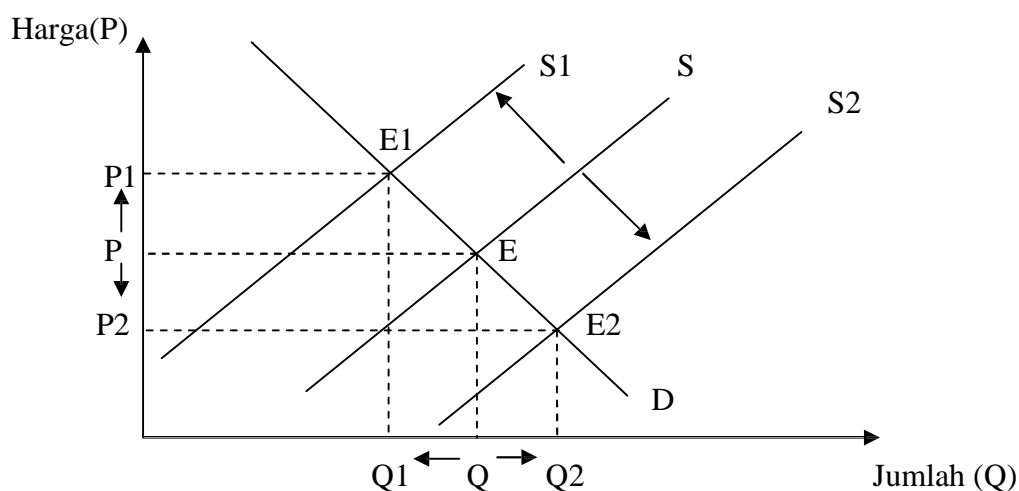
HASIL DAN PEMBAHASAN

Daya Saing Internasional Industri Kayu Lapis Indonesia Ditinjau dari Model *Heckscher-Ohlin (HO)*.

Secara teoritis, daya saing internasional suatu negara terhadap suatu produk terjadi apabila produksi produk melebihi jumlah permintaan pasar domestik suatu negara. Kelebihan produksi ini secara teori diakibatkan karena biaya produksi produk tersebut rendah sehingga mampu menghasilkan produk yang lebih banyak dan pada

akhirnya menggeser kurva penawaran (supply) ke arah kanan dari S ke S2. Dengan pergeseran ini, maka keseimbangan penawaran dan permintaan pasar domestik bergeser dari E ke E2. Akibat pergeseran ini, maka pasar domestic

kelebihan penawaran ($Q_2 - Q$) sehingga harga turun dari P menjadi P2 pada kondisi permintaan yang tetap. Industri dalam hal ini akan mendapatkan keuntungan apabila produk tersebut di jual ke pasar internasional atau ekspor (Gambar 4).



Gambar 4. Dampak Pergeseran Kurva Penawaran terhadap Pilihan Pemasaran Produk Industri (dalam negeri atau ekspor)

Fungsi produksi dengan pendekatan model H-O dalam industry yang menimbulkan pencemaran lingkungan sebagaimana digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh kebijakan lingkungan terhadap daya saing internasional suatu negara pada dasarnya secara teori bertujuan untuk menurunkan biaya produksi suatu produk dengan memanfaatkan *factor endowment* di suatu negara. Penggunaan faktor produksi yang melimpah dalam proses produksi secara teori menurunkan biaya produksi karena biaya factor produksi yang melimpah tersebut rendah. Dengan rendahnya biaya produksi ini, maka diharapkan kurva penawaran bergeser ke kanan sehingga terjadi kelebihan jumlah penawaran dalam pasar domestik. Akibatnya kelebihan produk tersebut diekspor sehingga negara tersebut memiliki daya saing internasional terhadap produk tersebut.

Indonesia sebagai salah satu negara tropis dengan luas kawasan hutan alam yang luas secara teori berpotensi memiliki daya saing internasional terhadap produk industri kayu lapis mengingat Indonesia memiliki *factor endowment* untuk produksi kayu lapis dalam hal ini adalah kayu bulat. Dengan kondisi ini, maka dapat dikatakan bahwa pencapaian ekspor kayu lapis Malaysia yang cenderung meningkat dan bahkan telah melebihi ekspor kayu lapis Indonesia (*lihat* Gambar 1 dan 2) membuktikan bahwa ketersediaan *factor endowment* dalam model H-O bukan merupakan satu-satunya factor yang dapat mendorong terjadinya daya saing internasional industri kayu lapis di Indonesia.

Secara empirik diketahui bahwa dalam pengembangan industry kayu bulat, pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan mengenai penyediaan bahan baku (kayu

bulat) industri kayu lapis. Kebijakan pemerintah Indonesia terkait penyediaan bahan baku industri kayu lapis dituangkan dalam kebijakan mengenai pasar kayu bulat. Kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia pada periode 1985 sampai 1997 dalam pengembangan industri kayu lapis adalah dengan kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Kebijakan larangan ekspor kayu bulat ini diberlakukan kembali menyusul dengan semakin menurunnya ekspor kayu lapis Indonesia pada Tahun 2001 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhut No. 1132/Kpts-II/2001 dan Menperindag No.292/MPP/Kep/10/2001. Perubahan kebijakan perdagangan kayu bulat sebagai bahan utama industri kayu lapis secara teori akan mempengaruhi kinerja industri kayu lapis. Astana (2003) mengatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi industri kayu lapis terkait dengan dihapuskannya larangan ekspor kayu bulat adalah pasar kayu bulat masih terdistorsi atau tidak.

Dengan asumsi seluruh industri pengolahan kayu tidak terkait Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau seluruh industri pengolahan kayu tumbuh tanpa kebijakan larangan ekspor kayu bulat, maka tidak adanya kebijakan larangan ekspor kayu bulat secara langsung akan menyamakan harga kayu bulat dalam negeri dengan harga ekspor. Sebaliknya, bila seluruh industri pengolahan kayu terkait dengan HPH, maka dihapuskannya kebijakan larangan ekspor kayu bulat belum tentu menyamakan harga kayu bulat dalam negeri dengan harga ekspor. Dengan asumsi perusahaan HPH telah puas dengan keuntungan normal dan risiko sebesar 25 persen, total biaya produksi kayu bulat (biaya pembalakan kayu bulat ditambah margin keuntungan normal dan risiko) akan mencapai \$US 22 per m³ (Brown 1999 dalam Astana 2003). Dengan harga kayu bulat ekspor sebesar US\$ 80 per m³, dan biaya transportasi ke Negara tujuan ekspor sebesar US\$ 38 per m³, maka rente ekonomi

yang ditangkap pemerintah sebesar US\$ 30 per m³.

Dengan asumsi pemerintah akan fleksibel dengan rente ekonomi yang harus diperoleh, maka berdasarkan perhitungan keuntungan dan risiko tersebut, investor industri terintegrasi vertikal akan mempertimbangkan apakah menutup industri pengolahan kayunya dan hanya mengekspor kayu bulat, atau tidak mengekspor kayu bulat dan akan mempertahankan industri pengolahan kayu terintegrasi vertikalnya. Dalam kondisi demikian, maka distorsi pasar kayu bulat tidak terjadi bila investor yang bersangkutan memutuskan untuk menutup industri pengolahan kayunya dan hanya akan mengekspor kayu bulat. Hal ini karena penghapusan kebijakan larangan ekspor kayu bulat akan menyamakan harga kayu bulat dalam negeri dengan harga ekspor.

Kebijakan pemerintah Indonesia khususnya mengenai perdagangan kayu bulat sebagai bahan baku utama industri kayu lapis (pemenuhan industri dalam negeri atau ekspor) secara empirik mempengaruhi kinerja industri kayu lapis Indonesia dalam menciptakan daya saing internasional. Dengan fakta ini membuktikan bahwa ketersediaan *factor endowment* dalam model H-O bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi daya saing internasional industri kayu lapis Indonesia.

Kebijakan Ekonomi Internasional dalam Pengembangan Industri Kayu Lapis Indonesia

Sejak Tahun 1970-an pemerintah Indonesia telah memberlakukan sejumlah kebijakan untuk mempengaruhi proses-pasar input dan output industri kehutanan. Secara umum sejumlah kebijakan tersebut pada intinya bertujuan untuk: a) Menjaga kelestarian sumberdaya hutan; b) Meningkatkan perolehan devisa; dan c) Menyerap tenaga

Daya Saing dan Kebijakan Ekonomi.... (M. Yusuf S. Barusman)

kerja. Dari sisi pencapaian tujuan perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja, sejumlah kebijakan yang diberlakukan pada periode 1970-an hingga 1990-an telah berhasil mencapai kedua tujuan tersebut. Dalam perolehan devisa, pada periode 1976-1984 total nilai ekspor kayu Indonesia mencapai US\$13,0 milyar dengan rata-rata pertahun mencapai US\$ 870 juta, tetapi pada periode 1985-1995 meningkat dengan signifikan mencapai US\$ 35,6 milyar dengan rata-rata pertahun sebesar US\$3,2 milyar. Dalam penyerapan tenaga kerja, pada periode 1970-1984 jumlah tenaga yang diserap mencapai 2,1 juta orang dengan rata-rata pertahun mencapai 0,24 juta orang, tetapi pada periode 1985-1997 meningkat dengan signifikan mencapai 6,5 juta orang dengan rata-rata per tahun mencapai 0,5 juta orang. Namun demikian, keberhasilan dalam pencapaian tujuan perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja tersebut tidak diimbangi oleh keberhasilan dalam pencapaian tujuan menjaga kelestarian sumberdaya hutannya (Astana dan Erwidodo 2001).

Kebijakan perolehan devisa sebagai tujuan utama pengembangan industri kehutanan mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya fokus pada pasar domestik saja. Dengan kata lain pasar global merupakan sasaran utama bagi perdagangan produk yang dihasilkan industri kehutanan khususnya kayu lapis. Berdasarkan kondisi ini, maka pemerintah Indonesia dapat dikatakan menerapkan kebijakan ekonomi internasional bagi pengembangan industri kehutanan khususnya kayu lapis. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai maksud tersebut adalah kebijakan yang mempengaruhi pasar kayu bulat. Sebelum krisis moneter bulan Juli 1997, dari sejumlah kebijakanyang dapat mempengaruhi pasar kayu bulat, terdapat satu kebijakan yang signifikan berpengaruh yaitu kebijakan pemberlakuan larangan ekspor kayu bulat. Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam

Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian No. 317/Kpts/Um/5/1980, Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 196/Kpb/V/80 dan Menteri Perindustrian No. 182/m/SK/5/1980 Tanggal 8 Mei 1980 Tentang Kewajiban Penyediaan Kayu untuk Kebutuhan dalam negeri dikaitkan dengan ekspor kayu bulat. Sebagai akibat kebijakan tersebut, pola perdagangan kayu bulat berubah, yaitu dari orientasi ekspor ke orientasi pasar dalam negeri. Sesuai dengan kebijakan tersebut, ekspor kayu bulat dilarang yang berlaku efektif mulai Tahun 1985. Kemudian untuk menghindari tuduhan internasional sebagai *non-tariff barrier*, kebijakan larangan ekspor kayu bulat tersebut diganti dengan kebijakan pajak ekspor tinggi (*prohibitive tax*) yang mulai berlaku efektif sejak bulan Juni 1992 (Manurung 1995 dalam Astana 2003).

Kebijakan larangan ekspor kayu bulat yang diberlakukan pemerintah Indonesia pada periode 1985 sampai 1997 secara nyata telah berhasil menjadikan industri kayu lapis Indonesia sebagai industri yang berhasil menguasai dan mendominasi pasar kayu lapis pada tingkat global (lihat Gambar 1 dan 2). Keberhasilan ini secara empirik menunjukkan bahwa dukungan kebijakan larangan ekspor kayu bulat telah berhasil menciptakan daya saing internasional industri kayu lapis Indonesia sangat tinggi. Krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1997 secara nyata telah mendorong terjadinya penurunan volume dan nilai ekspor kayu lapis Indonesia (lihat Gambar 1 dan 2). Dampak lebih jauh dari fenomena ini adalah perolehan devisa Indonesia dari perdagangan internasional dari sektor kehutanan khususnya kayu lapis menurun. Sebagai akibat dari kondisi ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pencabutan larangan ekspor kayu bulat sebagai upaya mempertahankan perolehan devisa dari sektor kehutanan.

Pencabutan larangan ekspor kayu bulat

secara nyata telah mendorong percepatan penurunan daya saing internasional industri kayu lapis Indonesia yang diindikasikan oleh penurunan volume dan nilai ekspor kayu lapis Indonesia (lihat Gambar 1 dan 2). Kebijakan pencabutan larangan ekspor kayu bulat ini secara nyata disambut eksportir dan pengusaha bidang kehutanan dengan melakukan ekspor kayu bulat dan mengesampingkan pemenuhan kayu bulat untuk bahan baku industri kayu lapis di dalam negeri. Fenomena ini pada dasarnya juga didorong oleh terjadinya ketimpangan antara harga kayu bulat di pasar luar negeri (FOB) dengan pasar dalam negeri.

Semakin terpuruknya industri kayu lapis sebagai akibat dibukanya kembali kran ekspor kayu bulat telah mendorong pemerintah Indonesia untuk kembali memberlakukan kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Kebijakan larangan ekspor kayu bulat ini diberlakukan kembali menyusul dengan semakin menurunnya ekspor kayu lapis Indonesia pada Tahun 2001 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhut No.1132/Kpts-II/2001 dan Menperindag No.292/MPP/Kep/10/2001.

Ketidakterdayaan industri kayu lapis Indonesia bersaing secara global sejak dibukanya kran ekspor kayu lapis Tahun 1997 membuktikan bahwa terciptanya daya saing industri kayu lapis Indonesia bukannya akibat ketersediaan *factor endowment* seperti dijelaskan dalam model H-O, namun daya saing internasional industri kayu lapis Indonesia banyak ditentukan oleh kebijakan ekonomi internasional pemerintah khususnya mengenai perdagangan kayu bulat. Pemberlakuan kembali kebijakan larangan ekspor kayu bulat oleh pemerintah Indonesia pada Tahun 2001 secara nyata tidak berhasil mendorong kembali bangkitnya industri kayu lapis Indonesia. Berdasarkan data Masyarakat Perakayuan Indonesia (MPI) Reformasi yang

diacu dalam Sihombing (2009), selama 8 tahun terakhir (2001 - 2008), sebanyak 105 industri kayu lapis di Indonesia bangkrut. Akibatnya, 300.000 pekerjanya kehilangan pekerjaan. Ancaman kebangkrutan industri kayu lapis nasional sudah di depan mata, karena tidak adanya permintaan ekspor. Jepang dan AS yang merupakan pembeli utama kayu lapis Indonesia sudah menghentikan order sejak November 2008 akibat krisis. Saat ini, kapasitas tak terpakai berada dititik akut, industri kayu lapis yang masih beroperasi tinggal 125 perusahaan, dengan kondisi produksi memprihatinkan.

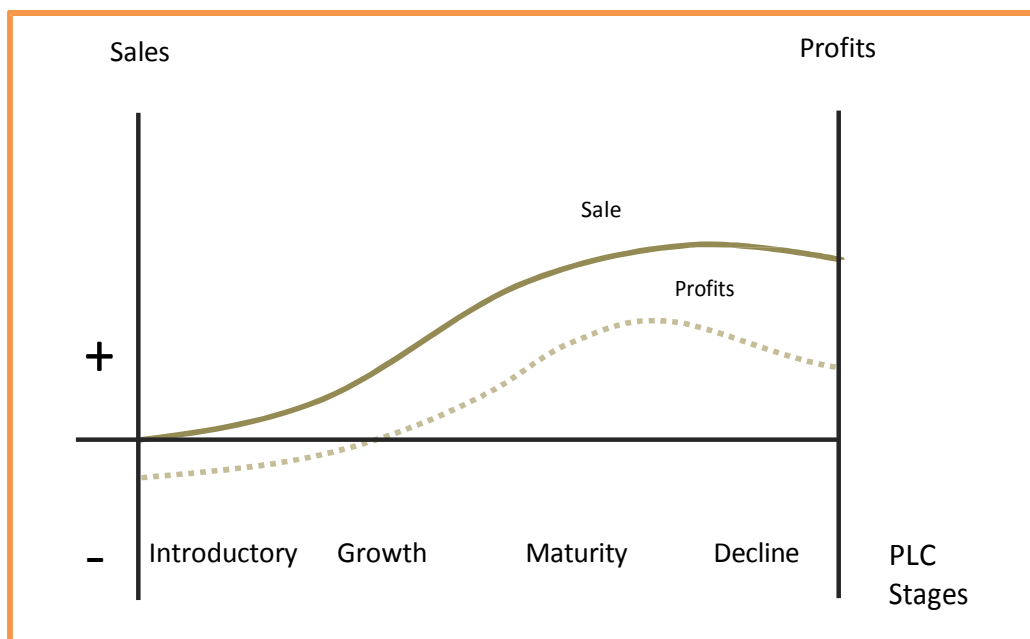
Fakta mengenai kebangkrutan industri kayu lapis Indonesia membuktikan bahwa pemerintah Indonesia gagal dalam menciptakan industri kayu lapis nasional yang efisien dan mampu bersaing dengan industri pada tingkat global. Peningkatan daya saing internasional industri kayu lapis Malaysia yang signifikan dan berhasil mengungguli daya saing internasional industri kayu lapis Indonesia semakin mempertegas bahwa pemerintah Indonesia gagal menciptakan industri kayu lapis nasional yang efisien dan mampu bersaing di pasar global. Dengan kondisi ini dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan daya saing internasional industri kayu lapis Indonesia tidak cukup hanya dengan mengandalkan ketersediaan *factor endowment* dan kebijakan ekonomi internasional terkait perdagangan kayu bulat semata, namun kebijakan untuk mendorong terciptanya industri kayu lapis yang efisien dan mampu bersaing pada tingkat global merupakan hal yang harus ditempuh oleh pemerintah.

Strategi Kebijakan Ekonomi Internasional Produk Kayu Lapis Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi

Kebijakan ekonomi internasional (larangan ekspor kayu bulat) yang diterapkan pemerintah Indonesia dalam pengembangan industri kayu lapis secara empirik telah gagal mewujudkan daya saing internasional produk kayu lapis Indonesia yang berkelanjutan. Bahkan diketahui bahwa kebijakan ini telah mendorong terjadinya kerusakan hutan alam dan kebangkrutan industri kayu lapis Indonesia. Manurung (2007) mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi pada industri kayu lapis Indonesia timbul karena berbagai hal, yaitu: kurangnya bahan baku atau berlebihnya kapasitas terpasang, merosotnya daya saing produk, tingginya pungutan-pungutan liar, tidak konsistennya kebijakan pusat dengan daerah, lebih disukainya produk-produk bersertifikat, dan rendahnya efisiensi industri akibat mesin-mesin yang sudah tua. Lebih lanjut, *In-house Experts Working Group* beserta *Working*

Group (WG) *Woodworking dan Furniture*, WG Panel kayu, WG Pulp dan Kertas serta para *stake holders* telah menyepakati bahwa ada enam permasalahan utama yang dihadapi oleh industri perkayuan Indonesia, yaitu: 1) Pasokan bahan baku kayu tidak cukup, 2) Over kapasitas, 3) Inefisiensi industri, 4) Daya saing produk rendah, 5) Pangsa pasar turun, 6) Produk kayu olahan bernilai tambah rendah.

Penurunan daya saing internasional kayu lapis Indonesia apabila dikaji lebih jauh dengan menggunakan konsep *Product-Life-Cycle* (PLC), maka dapat dikatakan bahwa kondisi yang terjadi pada produk kayu lapis Indonesia tersebut merupakan suatu kejadian yang alamiah dan pasti dialami dalam siklus produk. Hal ini mengingat dalam konsep PLC terdapat empat tahap yang dilalui oleh suatu produk, yaitu: *introductory stage*, *growth stage*, *mature stage* dan *decline stage* (Gambar 5).



Gambar 5. Kurva Keuntungan *Product-Life-Cycle* (PLC)

Dari Gambar 5, dapat dikatakan bahwa produk kayu lapis Indonesia dewasa ini telah memasuki tahap penurunan (*decline*) yang diindikasikan oleh penurunan volume dan nilai ekspor kayu lapis Indonesia yang terjadi sejak Tahun 1992 (lihat Gambar 1 dan 2). Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengembalikan daya saing kayu lapis melalui berbagai program revitalisasi secara nyata belum menunjukkan hasil adanya peningkatan daya saing internasional lapis Indonesia tinggal menunggu waktu hingga mengalami tahap akhir kehidupan produk kayu lapis. Dengan demikian, pemerintah sebagai pengambil kebijakan ekonomi internasional perlu untuk mengambil tindakan atau menentukan strategi-strategi terkait dengan kondisi produk kayu lapis Indonesia sehingga dapat lebih jauh akibat kebangkrutan industri kayu Indonesia dapat dikurangi, khususnya kerusakan hutan alam dan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal yang terjadi pada industri kehutanan di Indonesia.

Meyer dan Vambery (2008) mengatakan bahwa tidak ada perusahaan di dunia ini yang menginginkan produk yang dihasilkan-nya mengalami tahap penurunan (*decline*) bahkan sampai mengalami tahap akhir produk seperti yang dikemukakan dalam konsep PLC. Berkaitan dengan hal ini Meyer dan Vambery mengusulkan penyempurnaan konsep atau model PLC sebagai alat manajemen strategi, yaitu dengan menambahkan satu tahapan lagi yaitu tahap kehidupan kembali atau yang disebut dengan *Recycle for Life*. Penambahan tahap baru (tahap *recycle for life*) telah mengubah konsep PLC menjadi *Product Recycle for Life* (PRCL). Tujuan pengembangan model ini (PRCL) pada dasarnya adalah untuk memutus rantai PLC dari tahapan *mature* di *recycle* menjadi tahap pertumbuhan dan kalau dimungkinkan pada tahap *introduc-tory*. Hal ini dapat dipahami mengingat perusahaan/organisasi secara umum tidak

mau menghadapi tahap *decline* dan lebih senang agar perusahaan/organisasi selalu dalam tahap pertumbuhan (*growth*) atau pengenalan (*introduction*). Meyer dan Vambery (2008) mengatakan bahwa implementasi model PRCL dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu intervensi teknologi dan *marketing re-positioning* (MRP). Intervensi teknologi dapat dilakukan secara revolusioner (*Technological Re-Invention – TRI*) maupun evolusioner (*Technological Re-Design–TRD*).

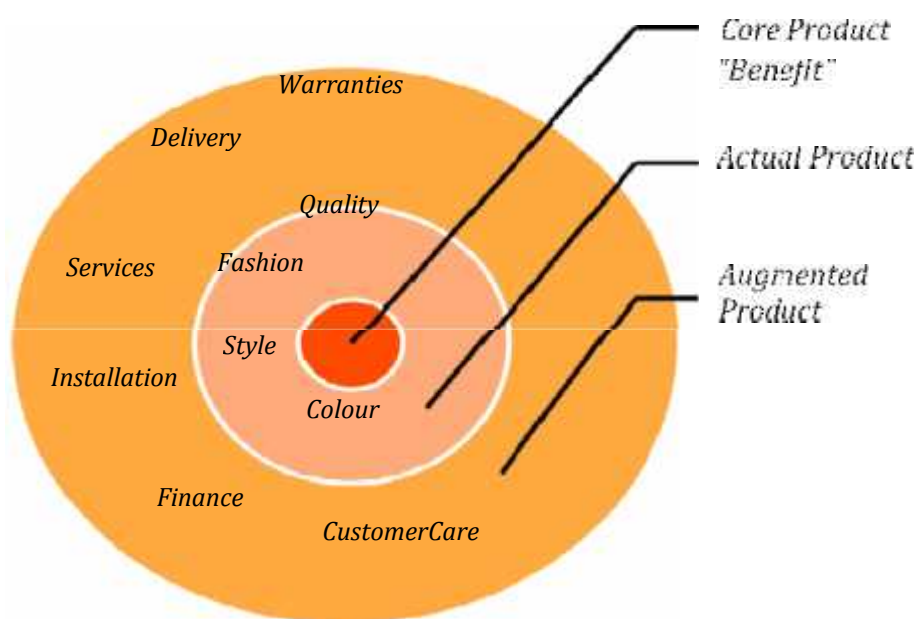
Berdasarkan konsep PRCL yang dikemukakan oleh Meyer dan Vambery (2008), dapat dikatakan bahwa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi penurunan daya saing produk kayu lapis Indonesia adalah dengan memutus rantai produk kayu lapis dan menciptakan tahap *recycle for life* dari produk kayu lapis Indonesia. Dengan kata lain konsep PRCL dapat digunakan pemerintah Indonesia sebagai pijakan atau dasar untuk membuat kebijakan ekonomi internasional produk kayu lapis dalam era globalisasi. Dua strategi dalam konsep PRCL, yaitu intervensi teknologi dan *marketing re-positioning* (MRP) merupakan dua konsep yang secara nyata dapat diterapkan untuk memutus rantai produk kayu lapis. Melihat kompleksnya permasalahan industri kayu lapis seperti yang dikemukakan oleh Manurung (2007), maka *marketing re-positioning* (MRP) merupakan salah satu cara yang paling mungkin diadopsi oleh pemerintah.

Berkaitan dengan hal ini, maka strategi kebijakan ekonomi internasional produk kayu lapis dalam menghadapi era globalisasi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Menghentikan kebijakan ekspor berbasis komoditas (kayu lapis) dan menggantikannya dengan kebijakan ekspor berbasis produk berdasarkan konsep bauran pemasaran (*marketing mix*), 2) Mengurangi secara bertahap

(menghentikan) kebijakan ekonomi internasional yang cenderung mengatur dan memanjakan industri kehutanan (kayu lapis) dalam negeri (kebijakan larangan ekspor kayu bulat), 3) Mendorong industri kayu lapis untuk lebih kreatif sehingga mampu menciptakan produk turunan dari kayu lapis berdasarkan konsep produk dalam bauran pemasaran.

Penghentian ekspor berbasis komoditas (kayu lapis) merupakan kebijakan ekonomi internasional yang harus ditempuh pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan kebangkrutan industri kayu lapis dan kerusakan hutan alam Indonesia dalam kondisi yang semakin parah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai tambah yang diperoleh Indonesia dari ekspor kayu lapis sangat rendah dan berdampak parah pada kerusakan hutan alam Indonesia. Kebijakan ekspor berbasis produk berdasarkan konsep bauran pemasaran (*marketing mix*) merupakan kebijakan ekonomi internasional yang layak menggantikan kebijakan ekspor berbasis komoditi (kayu lapis) untuk industri

kehutanan mengingat jika dilihat dari pengertian produk dalam konsep bauran pemasaran, kayu lapis secara umum saat ini tidak dapat dianggap lagi sebagai produk jika ditinjau dari konsep bauran pemasaran. Handayani (2009) mendefinisikan produk dalam konsep bauran pemasaran sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan, bisa berupa barang atau jasa yang dapat ditawarkan oleh suatu perusahaan. Pihak yang membeli dan memanfaatkan nilai dari penawaran perusahaan untuk suatu atensi, akuisisi, kegunaan, atau konsumsi dan ditujukan untuk memuaskan pelanggan. Suatu keinginan atau kebutuhan dari pelanggan yang membuat mereka memerlukan barang atau jasa tersebut. Produk dalam konsep bauran pemasaran dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu: 1) *Core Product*, yaitu manfaat sesungguhnya dari produk yang dibeli oleh pelanggan, 2) *Actual product*, yaitu produk nyata yang dapat digunakan oleh pelanggan, 3) *Augmented product*, yaitu produk nyata yang didukung oleh pemberian layanan dan manfaat tambahan untuk pelanggan (Gambar 6).



Gambar 6. Tiga Tingkatan Produk dalam Bauran Pemasaran

Penerapan tiga tingkatan produk dalam bauran pemasaran yang dikemukakan Handayani (2009) dapat dilihat pada kasus sepeda motor Honda Vario. *Core product* yang ditawarkan dalam hal ini adalah kemudahan transportasi dengan cepat, irit bahan bakar, dan waktu lebih cepat dibandingkan mobil. *Actual product* yang ditawarkan adalah motor otomatis Honda dengan warna merah muda. *Augmented product* yang ditawarkan adalah AHM *info*, AHM *care*, informasi suku cadang, *call center* 0800-10- HONDA.

Kebijakan larangan ekspor kayu bulat secara nyata telah menyebabkan industri kayu lapis dalam negeri yang tidak efisien dan cenderung tergantung pada kebijakan pemerintah guna menjaga kelangsungan hidupnya. Dengan demikian kebijakan larangan ekspor kayu bulat harus dikurangi secara bertahap bahkan perlu dihentikan untuk mendorong terciptanya industri kehutanan dalam negeri yang efisien dan mandiri sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi. Dalam era globalisasi, industri dalam negeri harus mampu bersaing dengan industri baik dalam maupun luar negeri untuk dapat menembus pasar internasional. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa hanya industri yang kreatif dan mampu menciptakan produk sesuai konsep bauran pemasaran yang akan mampu bertahan dan eksis dalam era globalisasi ekonomi yang tidak mungkin dihindari oleh setiap negara didunia.

Mengingat permasalahan industri kehutanan sangat kompleks (pasokan bahan baku kayu tidak cukup, over kapasitas, inefisiensi industri, daya saing produk rendah, pangsa pasar turun, dan produk kayu olahan bernilai tambah rendah), maka pemerintah Indonesia dalam menghadapi era globalisasi ini harus mampu mendorong industri kayu lapis untuk lebih kreatif sehingga mampu menciptakan produk turunan dari kayu lapis berdasarkan konsep produk dalam bauran pemasaran.

Pada akhirnya, dengan kebijakan ini diharapkan industri kayu lapis akan tumbuh kembali sebagai industri baru yang mampu bersaing dalam era globalisasi.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan. Secara teori ketersediaan *factor endowment* dalam model H-O merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya daya saing internasional industri kayu lapis Indonesia, namun demikian secara empiric ketersediaan *factor endowment* tersebut bukan satu-satunya faktor penyebab terciptanya daya saing internasional khususnya industri kayu lapis Indonesia. Kebijakan larangan ekspor kayu bulat Indonesia secara empirik memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap daya saing internasional kayu lapis Indonesia. Pengaruh positif kebijakan initerlihat pada periode 1985 - 1997, sedangkan pengaruh negatif terlihat pada periode 2001 hingga sekarang.

Kebijakan ekonomi internasional Indonesia (larangan ekspor kayu lapis) secara empirik telah menyebabkan sumberdaya hutan alam Indonesia menjadi rusak sehingga ketersediaan *factor endowment* (kayu bulat) menjadi langka dan mahal dan pada akhirnya menjadikan kayu bulat bukan sebagai *factor endowment* lagi. Kebijakan larangan ekspor kayu bulat telah menjadikan industri kayu lapis Indonesia sebagai industri yang tidak efisien dan tidak memiliki daya saing internasional (kelangsungan hidupnya sangat tergantung pada kebijakan pemerintah).

Kebijakan ekonomi internasional produk kayu lapis dalam menghadapi era globalisasi dapat ditempuh pemerintah Indonesia melalui berbagai strategi dengan menggunakan konsep *marketing re-positioning* (MRP),

diantaranya adalah: 1) Menghentikan kebijakan ekspor berbasis komoditas dan menggantinya dengan kebijakan ekspor berbasis produk berdasarkan konsep bauran pemasaran, 2) Menghentikan kebijakan ekonomi internasional yang cenderung mengatur dan memajukan industri kehutanan (kayu lapis) dalam negeri, 3) Mendorong industri kayu lapis untuk lebih kreatif sehingga mampu menciptakan produk turunan dari kayu lapis berdasarkan konsep produk dalam bauran pemasaran

Implikasi. Pengembangan industri (kayu lapis) yang memiliki daya saing internasional tidak cukup dilakukan dengan hanya mengandalkan ketersediaan *factor endowment* di dalam negeri (kayu bulat). Kebijakan ekonomi internasional (larangan ekspor kayu bulat) sebagai pendorong terwujudnya daya saing internasional industri (kayu lapis) perlu diikuti oleh kebijakan yang mendorong terciptanya industri (kayu lapis) dalam negeri yang efisien dan berdaya saing internasional. Pergantian paradigma kebijakan ekonomi internasional Indonesia dalam menghadapi era globalisasi perlu dilakukan dengan strategi mengganti paradigma lama (perdagangan komoditi) menjadi paradigma baru yang berlandaskan konsep *marketing re-positioning* (perdagangan produk yang memiliki "brand").

DAFTAR PUSTAKA

- Astana S, Subarudi, Muttaqin MZ. 2003. Evaluasi Kebijakan yang Mendis-torsi Pasar Kayu. *Info Sosial Ekonomi*. Vol.3No.1.
- Astana S, Erwidodo. 2001. *Pemberlakuan Kembali Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat*. Laporan Analisis Kebijakan Kehutanan. Policy Analisis No. 5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budayadan Ekonomi Kehutanan. Bogor.
- Babool MAI, Reed MR. 2005. International Competitiveness and Environmental Regulations. *Selected Paper Prepared for Presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting*. Providence, Rhode Island, July 24- 27, 2005.
- Dwiprabowo H. 2009. Analisis Daya Saing Ekspor Panel-Panel Kayu Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol.6 No.2.
- Handayani D, Andrizal, Darmaja A, Nasution RF, Ridwansyah A. 2009. *The Official MIM Academy Coursebook: MarkPlus Basics*. Jakarta: Esensi.
- Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. 2001. *Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat*. Jakarta.
- Manurung EGT, Simangunsong CB, Sukadri DS, Widyantoro B, Justianto A, Ramadhan S, Sumardjani L, Rochadi D, Permadi P, Priyono BM, Supriyanto B. 2007. *Road Map Revitalisasi Industri Kehutanan Indonesia*. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Meyer P, Vambery RG. 2008. Aligning Global Business Strategy Planning Models With Accelerating Change. *Journal of Global Business and Technology*. Volume 4, Number 1. Spring.
- Sihombing, ETM. 2009. *Industri Kayu Kian Terseok-seok*. <http://bataviase.co.id/detailberita-10462518.html> [10 Juni 2010].

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

UMUM

Artikel berupa kajian bidang Manajemen dan Bisnis baik artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual yang belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang dikirim ke jurnal lain. Naskah dikirim sebanyak dua eksemplar dan file naskah dalam DVD dengan microsoft office word 93-2007 disertai biodata penulis dalam lembar terpisah. Kepastian pemuatan akan diberitahu secara tertulis.

SISTEMATIKA PENULISAN

Artikel hasil penelitian terdiri atas: judul, nama dan alamat lembaga penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka.

Artikel konseptual terdiri atas: judul, nama dan alamat lembaga penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka.

Judul tidak boleh melebihi 14 kata (bahasa Indonesia) dan 12 kata (bahasa Inggris).

Nama Penulis ditulis lengkap tanpa gelar akademik disertai nama institusi tempat bekerja dan alamatnya.

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris (cetak miring) kurang lebih 200 kata dalam satu paragraf yang berisi masalah dan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan kesimpulan.

Kata Kunci mencerminkan konsep pokok artikel, jumlah antara 3-6 kata dalam bahasa Inggris.

Pendahuluan artikel hasil penelitian berisi: latar belakang, masalah, permasalahan, tujuan, kajian teoritis/kerangka pemikiran dan hipotesis. Artikel konseptual berisi: hal menarik yang menjadi acuan (konteks) permasalahan, diakhiri rumusan singkat hal pokok yang akan di bahas dan tujuan pembahasan.

Metode Penelitian berisi: desain penelitian, sasaran penelitian (populasi, sampel dan teknik sampling), sumber data, teknik pengumpulan data dan metode dan teknik analisis yang ditulis dengan format esei .

Hasil dan Pembahasan artikel hasil penelitian berisi: jawaban pertanyaan penelitian, proses mendapatkan, menginterpretasikan temuan, mengaitkan temuan dengan pengetahuan, memunculkan serta memodifikasi teori. Artikel konseptual berisi: kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan serta pendirian atau sikap penulis tentang masalah yang dibahas.

Kesimpulan artikel hasil penelitian berisi: ringkasan dan pengembangan pokok-pokok pikiran berdasar temuan, pengembangan teori dan penelitian lanjutan. Artikel konseptual berisi: penegasan atas masalah yang telah dibahas sebelumnya dan beberapa alternatif penyelesaian.

Daftar Pustaka. Semua rujukan dimuat dalam daftar pustaka dan ditempatkan pada halaman terakhir menyatu dengan tubuh artikel.

FORMAT PENULISAN

Artikel diketik pada kertas A4 dengan spasi tunggal (1 spasi), tipe huruf *times new roman* 12, margin tepi atas kertas 1,4", tepi bawah 1,2", tepi kiri 1", dan tepi kanan 1", panjang artikel 15-25 halaman, ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar serta disajikan secara naratif dan tidak bersifat numerik.

Judul artikel ditulis dengan huruf *times new roman* 14 dengan huruf kapital, bold, diletakkan di tengah. **Judul bab**, huruf kapital ukuran 12, bold, diletakkan di tengah. Sub judul, huruf besar kecil, bold, diletakkan di tepi kiri. Sub-sub judul dengan huruf besar kecil cetak miring, bold, diletakkan di tepi kiri.

Daftar Pustaka disusun berdasarkan urutan abjad nama akhir. Jika nama lebih dari satu kata maka diawali dengan nama akhir koma diikuti nama awal. Contoh penulisan daftara pustaka:

Artikel dalam Buku:

Hasibuan, Malayu . 1997. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: CV Haji Masagung

Artikel dalam Buku Kumpulan Artikel:

Noviyani, Putri. 2002. Pengaruh Pengalaman dan Pelatihan terhadap Pengetahuan Auditor tentang Kekeliruan. *Simposium Nasional Akuntansi 5* (hlm.76-92). Semarang: IAI.

Artikel dalam Jurnal:

Wijayanto, Bayu. 2003. Efek Gangguan Permintaan dan Penawaran terhadap Fluktuasi Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.9 No.2 (September), hlm. 169-181.

Artikel dalam Majalah atau Koran:

Oktavia, Tiur S dan Santi, Joice T. 3 Juli, 2007. Bisnis Perbankan Masyarakat Perlu Melek Investasi. *Kompas*, hlm. 21.

Artikel dalam Majalah/Koran Tanpa Penulis:

Lampung Post. 2007, 29 September. *Akses Modal Terbatas, UKM Gulung Tikar*. hlm. 21.

Dokumen Tanpa Pengarang dan Lembaga:

Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1990. Jakarta: PT Armas Duta.

Dokumen atas Nama Lembaga:

Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Karya Terjemahan:

Porter, Michael E. 1993. *Teknik Menganalisis Industri dan Bersaing*. Terjemahan oleh Agus Maulana. Jakarta: Erlangga.

Skripsi, Tesis atau Disertasi:

Alghifari, Abizar. 2008. *Analisis Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen CV.Retina Printing di Bandar Lampung*. Skripsi tidak diterbitkan. Bandar Lampung: FE-UBL.

Makalah Seminar, Penataran, atau Lokakarya:

Kadir, Samsir. 1996. *Mentalitas dan Etos Kerja*. Paper Seminar Nasional Strategi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 16-17 Juni.

Internet Karya Individual:

Purwanto, Andi T. 2004. *Manajemen Lingkungan: Dulu, Sekarang, dan Masa Depan*. (Online), (<http://andietri.tripod.com/index.htm>, diakses 14 Februari 2007).

Internet Artikel dari Jurnal

Kumaidi. 1998. Pengukuran Awal Belajar dan Pengembangan Tes. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid 5 No.4. (Online), (<http://www.malang.ac.id>, diakses 20 Januari 2000).

Penyajian Tabel

Nomor tabel menggunakan angka arab, Nomor dan judul tabel ditempatkan di atas tabel dari tepi kiri tidak diakhiri titik. Judul lebih dari satu baris diberi jarak satu spasi. Tabel tidak menggunakan garis vertikal. Teks sebelum dan sesudah tabel diberi jarak 2 sd 3 spasi. Jika lebih dari satu halaman, bagian kepala tabel diulang pada halaman berikutnya.

Penyajian Gambar

Nomor gambar menggunakan angka arab. Nomor dan Judul ditempatkan dibawah gambar secara senter. Sumber kutipan ditulis di dalam kurung diletakan di bawah gambar. Teks sebelum dan sesudah gambar diberi jarak 2 sd 3 spasi.

ISSN 2087-0701



9 772087 070108